

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan.

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan undang – undang desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa. Didalam pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendamping Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari : tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak Ketiga. Didalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas :

1. Pendamping Desa (PD) yang berada di tingkat kecamatan.
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten.

3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja pendamping desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka di anggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa. Maka di terbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendes Nomor 3 tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 Tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional (pendamping Desa). Berdasarkan uraian tersebut, maka yang di maksud peneliti mengenai pendampng Desa adalah Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintahan desa dapat membangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri.

Terbentuknya Pendampingan Desa memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa agar dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dapat terwujud. Perlunya pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa partisipatif untuk kemajuan desa.

Pendamping desa memiliki kewenangan penuh untuk mengetahui, melihat dan mengontrol kinerja pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Menteri Desa dan segala sesuatu yang mampu memberikan

kemandirian terhadap desa tersebut. Pendamping desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa menyatakan bahwa pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan desa

Adapun tugas dan fungsi pendamping desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping ialah mewujudkan desa yang mandiri dari berbagai macam bidang seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta bekerjasama dengan perangkat desa untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut.

Menurut Madhafie (2015), Tugas dari pendampingan Desa yaitu sebagai fasilitator dan pendamping pemerintah desa dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, membina dan memberdayakan masyarakat desa.

Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dengan cara yang kreatif dan inovatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa di berikan fasilitas belajar untuk mengolah kegiatan perekonomian desa secara mandiri. Memberikan *workshops* untuk peningkatan kapasitas aparatir pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa.

Pemerintah Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi peran utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Kemandirian desa memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri, oleh karenanya desa memiliki arti yang strategis.

Kinerja pendamping desa selama ini ketika mengawal dan memfasilitasi kebutuhan di Desa Sukataris masih terbilang minim. Karena hal ini dipicu dengan permasalahan Desa Sukataris yang begitu kompleks. Baik mulai dari aparatur, infastruktur, ekonomi dan SDM masyarakat. Pendampingan desa ini tidak akan mampu mengatasi hal tersebut secara langsung, butuh kerjasama seluruh pihak untuk menyelesaikan satu persatu. Selain itu, pendamping desa juga tidak hanya mengawal atau mendampingi satu desa saja melainkan 3 desa hingga lebih. Hal ini tentunya sangat akan mengganggu konsentrasi para pendamping dalam mengawal desanya dan hal tersebut tudak akan bisa maksimal dan efektif.

Salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi sealama ini disebabkan oleh ; (1) ketidakmandirian pemerintah desa dari struktur pemerintah diatasnya, (2) praktik pemerintah desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena matinya kemampuan masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, (3)

ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan kurangnya fungsi-fungsi kelembagaan desa (Soleh, 2014).

<https://ojs33.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/146>

Pendamping masyarakat merupakan istilah yang lebih disukai di kalangan pekerja sosial, khususnya mereka yang melakukan sejumlah pekerjaan pengembangan masyarakat. Istilah pendamping masyarakat diartikan lebih sebagai „teman sejajar“ atau mitra masyarakat ketimbang „petugas“ yang berkonotasi bekerja untuk lembaganya dengan melaksanakan tugas di lapangan. Edi Soeharto menyebut pekerja sosial ini dengan *sociater* (Suharto,2014).

Selain pendamping masyarakat, istilah fasilitator masyarakat (*community facilitator*) juga digunakan sebagai alternatif pendamping masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan kegiatan pengembangan masyarakat yang lebih menekankan pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitator menggambarkan bahwa pekerja pendamping masyarakat itu berperan sebagai pendorong, penggerak, katalisator dan motivator masyarakat.

<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/2829>

Adanya pendampingan desa diharapkan mampu mendorong perubahan dalam masyarakat desa serta bergerak cepat untuk menyusun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasarannya adalah pembangunan fisik, sarana prasarana desa, pemberdayaan

masyarakat dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa.

Pemberdayaan dalam arti luas merupakan suatu tindakan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional agar secara perorangan dan atau kelompok masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan masyarakat memiliki kaitan erat dengan sustainable development di mana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi dan sosial yang dinamis, serta menuju kepada kemandirian.

Melalui proses dalam pemberdayaan maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut, masyarakat harus menjalani proses tersebut dengan berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan diperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu dan akan terakumulasi kemampuan yang memadai, untuk mengantarkan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang mandiri.

<https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/view/3086>

Meninjau kemandirian desa, berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam berpartisipasi mengembangkan potensi desa. Pembangunan desa yang bertumpu pada masyarakat mengarah pada pembinaan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan. Peningkatan peran masyarakat menjadi dasar dalam kemandirian desa yang bersifat jangka panjang melalui pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya desa untuk menghasilkan modal pembangunan.

Peran masyarakat dijalankan melalui keberdayaannya yang mengarah pada prinsip gotong-royong dalam masyarakat untuk mengembangkan desa mandiri dan sejahtera. Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut ditinjau dari kekuatan lokal yang mengacu pada kapasitas masyarakat, dimulai dari proses penyadaran untuk membentuk komitmen dalam masyarakat dengan dukungan pemerintah desa dan komunitas sebagai kelembagaan yang menggerakkan pembangunan desa (Dwiyanto & Jemadi, 2013).

Mut'adin (2002, hlm. 9) kemandirian adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan, individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri dengan kemandiannya seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih mantap. Kemandirian (self-reliance) adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep ini program-program pembangunan dan pemberdayaan dirancang secara sistematis agar individu ataupun masyarakat menjadi subyek dari pemberdayaan tersebut.

Dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia dirasakan perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, berwawasan dan mempunyai keunggulan serta keterampilan sehingga akan mencapai suatu kemandirian pada diri masyarakat itu sendiri dan tak luput dari kehadiran Pendamping Desa agar mampu menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasarannya adalah pembangunan fisik, sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa.

Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Peran pendamping desa di desa Sukataris masih belum optimal dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa, serta, kurangnya pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya peningkatan kualitas kelembagaan desa

serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami dan bahkan banyak yang tidak mengetahui apa itu pendamping desa. Serta pendamping desa juga jarang berada di desa Sukataris yang mereka dampingi.

Oleh karena itu peran pendamping desa penting untuk di teliti, mengingat sasaran yang ingin di capai terhadap tujuan pendamping desa salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat. sehingga penulis mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul “ Peran Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
2. Bagaimana hambatan dan pelaksanaan Peran Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
3. Bagaimana intervensi Pekerja Sosial dalam melihat Peran Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Peranan Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
2. Mendeskripsikan hambatan dan pelaksanaan Peran Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
3. Bagaimana Intervensi Pekerja Sosial dalam melihat Peran Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini semoga bisa bermamfaat untuk menjadi bahan masukan dan dapat dijadikan sebagai penambah bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai Peran Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
2. Kegunaan praktis, penelitian ini dihrapkan dapat bermanfaat untuk menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran, memeberikan informasi pada masyarakat mengenai Peran Pendamping Desa dalam Membangun Kemndirian Masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

1.4 Kerangka Konseptual

Masyarakat merupakan makhluk sosial yang dimana mereka telah bekerja sama dan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Dalam masyarakat mereka mematuhi norma, maupun nilai-nilai yang telah mereka patuhi bersama dan masyarakat dapat menghasilkan budaya. Adapun pengertian masyarakat menurut Paul B Horton dan C. Hunt dalam Hamda (2014) adalah:

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

Masyarakat tentunya terjadinya berbagai proses interaksi dan kegiatan maupun keberlangsungan hidup. Kesejahteraan merupakan salah satu hal yang harus didapatkan oleh masyarakat agar tentunya tidak mendapatkan masalah. Kesejahteraan sosial merupakan suatu cara yang sudah tersusun dan terencana dengan baik untuk mencapai standar hidup yang lebih baik yang meliputi kebutuhan fisik, mental, emosional, ekonomi dan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial maupun tunjangan sosial yang dilaksanakan oleh perorangan, Lembaga-lembaga sosial, masyarakat atau pemerintah. Menurut Edi Suharto dalam bukunya *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (2014) bahwa kesejahteraan sosial adalah:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh

lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Pekerja sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip keberhasilan pekerja sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”. Peran seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung, oleh karena itu pekerja sosial sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan dalam pemberdayaan masyarakat (Edi Suharto, 2014).

Pekerja sosial adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendampingan dengan dan masyarakat sekitarnya, dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber atau potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Agar menjadi terarah dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya tujuan yang sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Sumodiningrat bahwa tujuan pekerja sosial adalah :

1. Meningkatkan motivasi kemampuan dan peran anggota dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan anggotannya.

2. Meningkatkan kemampuan yang didampingi dalam menemukali permasalahan dan potensi sumber daya sosial dan ekonomi yang ada di lingkungannya.
3. Meningkatkan kemampuan dalam hal merencanakan melaksanakan, mengevaluasi usaha ekonomi produktif, termasuk dalam penyusunan proposal pengembangan usaha.
4. Meningkatkan kemampuan dalam mempertanggung jawabkan pemanfaatan dana bantuan untuk usaha ekonomi produktif dengan membuat pembukuan sederhana dalam meningkatkan akses keuangan.

Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar membantu dirinya sendiri. Dalam konteks ini peranan pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyempuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. (Suharto, 2006).

Suharto (2006) merumuskan kegiatan serta proses pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan (enabling) atau fasilitasi, penguatan (empowering), perlindungan (protecting), dan pendudukan (supporting):

Pemungkinan atau Fasilitasi, merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

Penguatan, fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.

Perlindungan, fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

Pendukung, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), secara konseptual berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan

berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. (Suharto, 2006).

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan suatu desa perlu adanya pemberdayaan dan peran pendamping desa agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, berwawasan dan mempunyai keunggulan serta keterampilan sehingga akan mencapai suatu kemandirian pada diri masyarakat itu sendiri. Terbentuknya

pendamping desa yang memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa agar dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dapat terwujud.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Meleong, 2017) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2017) juga mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut David Williams, 1995 yang dikutip oleh Moleong, 2017 menulis bahwa penelitian kualitatif adalah:

“Pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Artinya definisi tersebut memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.”

1.5.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus (case study). Dalam penelitian lapangan, studi kasus memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan intraksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat. Sesuai

dengan yang disampaikan oleh Robert K Yin (2008) bahwa studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan nyata yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2010) yang menyatakan bahwa studi kasus adalah

“Strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.”

Penelitian studi kasus ini mengarahkan kepada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai situasi kondisi dalam suatu konteks, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut keadaan sebenarnya dilapangan. Mengingat bahwa jenis penelitian studi kasus ini sangat mementingkan deskripsi proses tentang apa, mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, untuk mengarah pada pemahaman makna dari suatu fenomena yang dikaji.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini maksud dan tujuan peneliti menggunakan teknik studi kasus didasarkan pada asumsi bahwa penelitian ini bermaksud untuk mendefinisikan kasus, memahami isu, mendapatkan keterangan atau gambar secara aktual dan faktual terhadap gejala sosial, dalam arti bahwa penelitian tersebut memusatkan pada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang, yaitu memperoleh gambaran yang nyata mengenai Peran Pendamping Desa dalam Membangun

Kemandirian Masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

1.5.2 Teknik Pemilihan Informan

Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi hal tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti atau wawancara mendalam. Sementara, Moleong 2015;163 menyatakan bahwa informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik sampling digunakan oleh peneliti yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) menyatakan bahwa:

“*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Peneliti ingin melakukan penelitian tentang Peran Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Desa di Desa Sukatarais Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Informan dalam penelitian ini yaitu Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Desa di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

1.5.3 Sumber dan Jenis Data

1.5.3.1 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian.

1.5.3.2 Jenis Data

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik (Moleong, 2019).

a. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film.

b. Sumber Tertulis

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

c. Foto

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai

keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (Bogdan dan Biklen, 1982:102).

d. Data Statistik

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Menurut (Soehartono, S 2015) wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).

Peneliti melakukan wawancara pada Pendamping Desa di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Mengenai membangun kemandirian masyarakat.

2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) (dalam Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Menurut (Soehartono, 2015) Secara luas, observasi atau pengamatan

berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi tak partisipan. Menurut (Soehartono, 2015) dalam observasi tak partisipan, pengamat berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Dalam penelitian ini bersifat nonpartisipatif yaitu peneliti hanya mengamati subjek dari luar tanpa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Teknik ini digunakan peneliti untuk mengamati langsung bagaimana peran Pendamping Desa dalam menangani dan membangun kemandirian terhadap masyarakat di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah.

3. Studi Dokumen

Secara umum dokumen adalah tulisan penting yang memuat informasi, dan studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya. Moleong (2017:216) menyatakan bahwa dokumen itu dapat dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi dibagi menjadi dokumen internal dan eksternal.

Dokumen internal dapat berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial.

1.5.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987: 331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi,

orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka dapat diadakan pengolahan data atau yang disebut dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen, 1982 sebagaimana dikutip oleh (Moleong, 2017) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisis dan kemudian menyajikannya secara tertulis dalam bentuk laporan, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Miles dan Huberman.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari data-data yang ada sedemikian rupa, kemudian ditentukan pola yang dapat memberikan gambaran lebih tajam. Dengan pola tersebut dapat mempermudah peneliti dalam mencari kelengkapan data yang belum diperoleh. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian ini berlangsung. Dalam mereduksi data, penelitian ini memfokuskan pada pendamping desa untuk menangani masyarakat dan merangkum data-data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan, maupun berasal dari dokumen-dokumen publikasi umum, serta data-data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan tujuan data yang telah diperoleh dapat dengan mudah dianalisis dan disimpulkan. Milles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam tahap ini, peneliti menyusun data hasil observasi di lapangan, wawancara dan analisis dari data dokumentasi yang ada serta data lain yang diperoleh untuk kemudian dinarasikan supaya lebih mudah dipahami.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Kesimpulan awal yang telah diperoleh masih

bersifat sementara, dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Oleh karena itu, penulis harus kembali kelapangan untuk memverifikasi data dan mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan dapat dapat dipercaya dan kredibel.

1.5.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian dengan tujuan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Untuk mempermudah peneliti mendapatkan data maka lokasi penelitian akan di lakukan di Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

1.5.8 Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		2022			2023		
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Tahap Pra Lapangan							
1	Penjajakan	■					
2	Studi Literatur	■					
3	Penyusunan Proposal	■	■				
4	Seminar Proposal			■			
5	Penyusunan Pedoman Wawancara			■	■		
Tahap Pekerjaan Lapangan							
6	Pengumpulan Data				■	■	
7	Pengolahan dan Analisis Data				■	■	
Tahap Penyusunan Laporan							
8	Bimbingan Penulisan		■	■	■	■	■
9	Pengesahan Hasil Penelitian Akhir					■	■
10	Sidang Laporan Akhir					■	■

